

ANALISIS PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANJARMASIN

Phaureula Artha Wulandari

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin

Email : ayu.phaureula@akuntansipoliban.ac.id

Emy Iryanie

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin

Email : jasmine_emy@yahoo.com

Abstrak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan jenis pajak daerah yang mempengaruhi PAD, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk Dispenda di dalam mengelola Pendapatan Asli daerah terutama dari pajak daerah.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis statistik menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS 18. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Target dan Realisasi Penerimaan PAD 2007 – 20014. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya secara parsial pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan PPJU berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin, hal ini berdasarkan t hitung lebih besar daripada t table. Sedangkan pajak hiburan dan pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan, pendapatan asli daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, PPJU dan pajak parkir.

The results of this study are expected to describe the types of local taxes that affect revenue, so as to provide policy recommendations to Dispenda in managing local revenue mainly from local taxes. The analytical method used is the method of statistical analysis using Multiple Regression with SPSS 18. The data used in this research is data PAD Target and Actual Receipts 2007 - 20014. The results showed that partially hotel tax, restaurant tax, advertisement tax and PPJU effect on revenue (PAD) Banjarmasin, this is based on the t more greater than t table. While the entertainment tax and parking tax has no effect on revenue. Simultaneously, local revenue (PAD) is influenced by the hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, advertisement tax, PPJU and parking tax.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini semua pihak pemerintah dan sector swasta tentunya harus bersiap menghadapi peluang dan tantangan MEA. Lima pilar MEA akan bebas keluar masuk di Negara ASEAN yakni arus barang, jasa, modal, investasi dan tenaga kerja terlatih. Bertujuan agar stabilitas perekonomian di ASEAN diharapkan menjadi lebih terjaga, terjadi peningkatan daya saing kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan penduduk negara anggota ASEAN. Salah satu konsekuensi dari lima pilar ekonomi di ASEAN tersebut dilihat dari sisi perpajakan dimana dalam *Blueprint* ASEAN adalah kebijakan pemotongan pajak (*withholding tax*) dan perluasan jaringan Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda (P3B) antar Negara ASEAN.

Selama ini di masyarakat lebih sering membahas dampak MEA terhadap Pajak Pusat (PPN dan PPh), sedangkan Pajak daerah masih sangat jarang. Bila kita lihat dari pilar tersebut tentunya akan sangat mendukung penerimaan pajak yang dikelola Negara dari sector PPN, PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi. Sedangkan penerimaan pajak yang dikelola daerah lebih focus berasal dari pilar investasi. Upaya pemerintah daerah harus optimal agar dapat menarik investasi dari Negara ASEAN sebagai Penanam Modal Asing (PMA) ke daerahnya dan juga bagaimana industry local tetap terlindungi sehingga mendukung iklim kompetitif perekonomian yang sehat.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apabila dilihat dari APBD jenis pendapatan di setiap daerah dapat dibedakan menjadi tiga yaitu pendapatan bersumber dari PAD, Bagian Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun PAD dapat bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah (Abdul Halim; 2008, 271-279). Sumber PAD berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. (Prameka, Indrawati, 2014).

Pajak daerah dan Retribusi Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dimana pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak daerah yang dikelola daerah menjadi lebih banyak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Jenis pajak daerah yang beragam menuntut pemerintah daerah dapat lebih optimal mengelola sumber pajak daerah tersebut dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD cukup besar, namun kontribusi PAD relative kecil terhadap APBD. Realisasi penerimaan APBD di tahun 2014 dari PAD pada Pemerintah Kota Banjarmasin hanya sebesar 15,11%. Kondisi tersebut menjadikan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) harus mampu meningkatkan PAD agar

dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap seluruh pendapatan. Karena seluruh pendapatan terbesar bersumber dari Bagian Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), hal ini menunjukkan tingkat kemandirian kota Banjarmasin masih tergantung pada pemerintahan pusat.

Berdasarkan latar belakang di atas, dimana PAD merupakan salah satu cermin kemandirian ekonomi suatu daerah, peneliti tertarik untuk menguji pengaruh kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan Pajak Parkir terhadap PAD tahun 2007-2014.

1.2 Wawasan Perencanaan Masalah

Berdasarkan kondisi yang ada selama periode penelitian, bagaimanakah Dispenda berdasarkan UU No.28 /2009 dapat mengelola Pajak Daerah dan dapat memanfaatkan MEA di dalam mengelola PAD terutama untuk meningkatkan Pajak Daerah.

1.3 Rumusan Tujuan Penelitian

Menganalisis pengaruh secara Parsial dan secara simultan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PPJU dan Pajak Parkir terhadap PAD kota Banjarmasin

1.4 Manfaat Penelitian

1 Kontribusi Terhadap Pengembangan Ilmu

Luaran hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga untuk pengembangan teori pajak daerah dan akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama yang bersumber dari berbagai jenis pajak daerah yang dikelola.

2 Kontribusi Terhadap Dispenda

Luaran hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi bagi Dispenda di dalam merumuskan kebijakan tentang pengelolaan pajak daerah berdasarkan UU No.28 tahun 2009.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak, Fungsi Pajak dan Pajak Daerah

Pengertian Pajak menurut H.Rochmat Soemitro, SH (1994) adalah iuran kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar keperluan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi yang wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Musgrave dan Musgrave (1991), fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi dapat dibedakan atas dua macam, yakni fungsi anggaran (*budgetary*) dan fungsi pengaturan (*regulatory*).

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik dan Keuangan Daerah

Organisasi sektor publik (Deddi Nordiawan; 2009) merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri, karena memiliki sumber daya ekonomi, melakukan transaksi ekonomi dan keuangan namun dikelola tidak untuk mencari laba (nirlaba). Akuntansi keuangan (pemerintah) daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar semenjak reformasi tahun 1998, Undang – undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Otda).

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan yang berlaku. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah, sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan adalah BUMD.

2.1.3. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan PAD

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah antara lain:

1. Pendapatan
 - 1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
 - 1.2. Pendapatan transfer,
 - 1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah.
2. Belanja
 - 2.1. Belanja operasi,
 - 2.2. Belanja modal,
 - 2.3. Belanja tak terduga.
3. Transfer
 - 3.1. Transfer / bagi hasil ke desa
4. Pembiayaan Daerah
 - 4.1. Penerimaan Pembiayaan
 - 4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Struktur APBD berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, PAD terdiri atas Pajak daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. PAD menurut Darise (2008: 135) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

2.1.4. Jenis Pajak Daerah

Pajak yang dikelola atau dipungut oleh Pemerintah Daerah menurut Darise (2008: 135) ada 4 jenis yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; pajak bahan bakar bermotor; dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak yang dikelola atau dipungut oleh pemerintah kabupaten/ kota menurut Darise (2008: 135) terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak ppju dan pajak parkir. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/ kota dapat ditetapkan jenis pajak lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang secara spesifik dan potensial di daerah.

Beberapa objek pajak antara lain sebagai berikut :

- a. Pajak hotel
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- b. Pajak restoran
Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga cafe, bar, bakery, rumah makan, jasa boga/catering, jamuan makanan hotel, puja sera, pondok lesehan, depot, warung makan, warung makan kaki lima dan atau usaha lain yang sejenis.
- c. Pajak hiburan
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
- d. Pajak reklame
Pajak reklame adalah pajak terhadap penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh orang atau badan yang meliputi: reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, reklame peragaan.
- e. Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)
Pajak penerangan jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik. Obyek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
- f. Pajak parkir
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang kami lakukan adalah replikasi dari berbagai penelitian terdahulu, dimana letak persamaan penelitian terdahulu adalah sama – sama meneliti tentang pajak daerah atau bagian dari jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada: a) penelitian sebelumnya menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan rumus dan b) penelitian sebelumnya menggunakan uji statistik tetapi mengglobalkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah.

No	Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Randy J.R.Walakanndou (2013))	Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli (PAD) di Kota Manado..	Pajak Hotel sebagai variable Independent PAD sebagai Variabel dependent	Metode Analisis Deskriptif , dengan rumus kontribusi	Pajak hotel memberikan kontribusi yang cukup besar kepada PAD Manado tahun 2007 – 2011, yaitu 5,5% (2007), 5,38% (2008), 8,11% (2009), 8,11% (2010) dan 7,71% (2011).
2	Md. Krisna Arta Anggar Kusuma & Ni Gst. Putu Wirawati (2013)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali	variabel bebas yaitu pajak daerah dan retribusi daerah variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah	Tehnik analisis regresi linier berganda yang dapat diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. .	Secara parsial, variabel penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Secara parsial, variabel penerimaan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil statistik menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah lebih dominan kontribusinya dalam peningkatan PAD Provinsi Bali yakni sebesar 84,9% sedangkan untuk retribusi

3	Rahayuning sih (2009)	Analisis Efektifitas Pajak Reklame terhadap Peningkat an PAD di Kabupaten Banyuwangi	Target Pajak Reklame Realisasi Pajak Reklame Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah	Metode Analisis Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah mengalami penurunan pada tahun 2006 dengan rata-rata sebesar 4,15% dari tahun 2005 dan mengalami peningkatan pada tahun 2007 dengan rata-rata sebesar 4,05%. 2. Efektifitas penerimaan pajak reklame tahun 2005 sampai tahun 2006 mengalami penurunan dari 51% menjadi 49%, namun mengalami peningkatan pada tahun 2007 sebesar 52%
4	Isroy Antoni SE, ME, Ph.D dan Nurul Huda SE, M.Si (2011)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Otonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang	Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Otonomi Daerah sebagai variabel independen. Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen	Metode Analisis Regresi Linear Berganda	Pajak dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Padang sedangkan otonomi daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD Kota Padang
5	Martani Setyawati Prodi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Fak Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010	Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Sragen	Retribusi jasa pelayanan umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan khusus sebagai variabel independen. Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen	Metode Analisis Regresi Linear Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1) Retribusi daerah yaitu retribusi jasa pelayanan umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan khusus berpengaruh terhadap PAD, 2) Retribusi jasa pelayanan umum berpengaruh terhadap PAD, 3) Retribusi jasa usaha berpengaruh terhadap PAD

					4) Retribusi perijinan khusus berpengaruh terhadap PAD
6	Okta Sigit Utomo Fak Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independen. Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen	Metode Analisis Regresi Linear Berganda	Secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD pada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah Karisidenan Surakarta
7	Siti Rochimah, Kharis Raharjo, SE, M.Si, Ak, Abrar Oemar, SE Mahasiswa dan dosen Jurusan Akuntansi Fak Ekonomi Univ Pandanaran Semarang	Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap PAD pada Kab/Kota Prov Jawa Tengah Tahun 2007 - 2012	Pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi daerah sebagai variabel independen. Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen	Metode Analisis Regresi Linear Berganda	1) Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pajak hotel dan restoran terhadap PAD, 2) Ada pengaruh yang signifikan dan positif antara retribusi daerah terhadap PAD 3) Ada pengaruh yang signifikan antara pajak daerah terhadap PAD.
8	Nariana, Siti Khairani, Ratna Juwita Jurusan Akuntansi STIE MDP	Analisis Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Kota Palembang	Pajak parkir sebagai variabel independen. Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen	Regresi linear sederhana dari regresi partial	Kontribusi pajak parkir berpengaruh terhadap PAD, yang mana akan meningkatkan PAD Kota Palembang.
9	Adi Nugroho Universitas Dian Nuswantoro	Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten	Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independen. Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen	Metode Analisis Regresi Linear Berganda	1) Pengaruh pajak daerah terhadap PAD memiliki pengaruh yang positif yang berarti bahwa penambahan satu satuan maka PAD akan mengalami kenaikan. 2) Pengaruh retribusi daerah terhadap PAD memiliki pengaruh yang positif, yang

		/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 - 2012			berarti bahwa penambahan satu satuan maka PAD akan mengalami kenaikan.
10	Stevanus J. Gomie dan Victor Pattiasina STIEM Rutu Nusa Ambon	Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Maluku Tenggara	Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independen. Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen	Metode Analisis Regresi Linear Berganda	Angka pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Melemahnya angka pertumbuhan realisasi ini disinyalir disebabkan oleh faktor” banyak sumber”nya pajak daerah yang belum digali, rendahnya tingkat pendapatan per kapita masyarakat dan kurangnya kemampuan pemda dalam menggali sumber” pajak daerah yang ada. Berdasarkan hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa pajak dan retribusi daerah dapat menaikkan PAD. Dari objek PAD yaitu pajak dan retribusi yang telah dianalisis dengan metode statistik dengan menggunakan model regresi berganda menggambarkan adanya penerimaan yang bervariasi. Dari kedua objek tersebut yang memberikan kontribusi yang paling baik adalah retribusi daerah dimana realisasi PAD lebih kecil dari target yang ditetapkan.

3. METODE

3.1 Metode Penelitian

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis statistik menggunakan regresi linear berganda atau *Multiple Regression* dengan SPSS 18 . Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Target dan Realisasi Penerimaan PAD Banjarmasin 2007 – 20014. Populasi penelitian ini adalah semua jenis pajak daerah yang merupakan komponen dari PAD selama tahun 2007 – 2014. Jumlah sampel ini diambil dengan metode *purposive sampling* , artinya sampel dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif penelitian yang memenuhi syarat yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel, yakni jenis pajak daerah yang selalu ada selama tahun penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut sampel penelitian adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan Pajak Parkir.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukakan dengan cara :

1. Dokumentasi
 Sumber data penelitian yang digunakan yaitu data sekunder dari Dispenda kota Banjarmasin seperti Target dan Realisasi Penerimaan PAD Banjarmasin 2007 – 20014, LAKIP dan sebagainya.
2. Wawancara
 Untuk menggali informasi mengenai upaya yang telah dilakukan oleh Dispenda didalam mengelola penerimaan dari pajak daerah.
3. Study Pustaka
 Mempelajari beberapa literature, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3 Teknik Analisis Data

Tehnik analisis yang digunakan adalah tehnik analisis regresi linier berganda yang dapat diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. Analisis ini digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen yakni realisasi pajak hotel (X1), realisasi pajak restoran (X2), realisasi pajak hiburan (X3), realisasi pajak reklame (X4), realisasi PPJU (X5), realisasi pajak parkir (X6) pada variabel dependen yakni realisasi PAD kota Banjarmasin (Y).

Model regresi menurut Ebimobowei (2013):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X 1 = realisasi pajak hotel

X 2 = realisasi pajak restoran

X 3 = realisasi pajak hiburan

X 4 = realisasi pajak reklame

X 5 = realisasi PPJU

X 6 = realisasi pajak parkir

e = error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Data

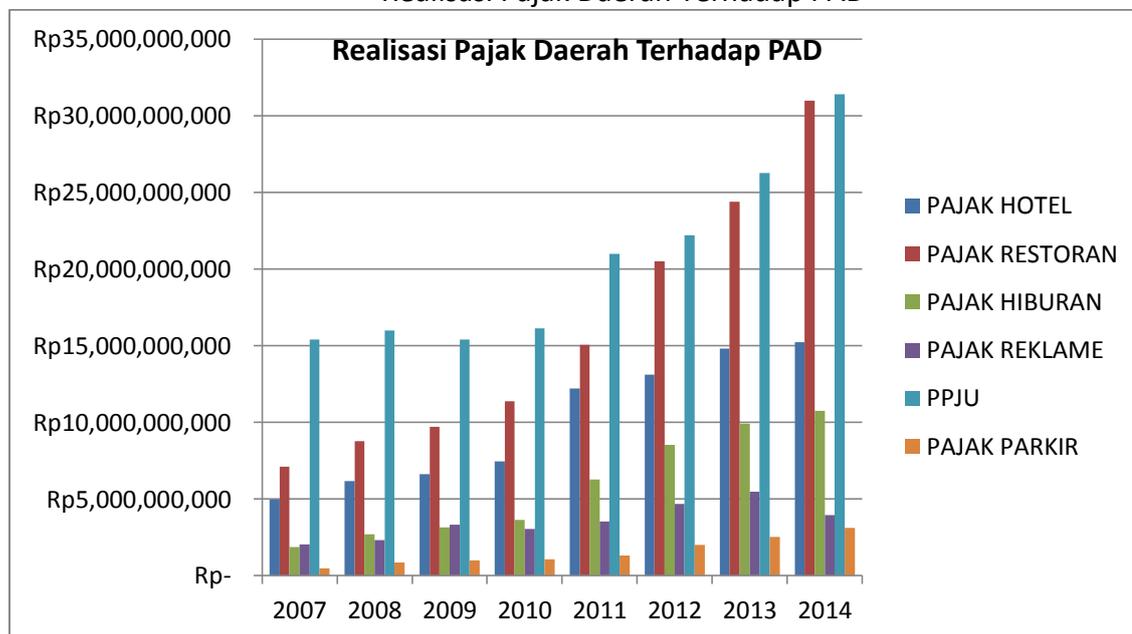
Banjarmasin dikenal sebagai kota seribu sungai dimana sektor perdagangan, hotel dan restoran sangat diminati dengan menyerap tenaga kerja terbesar. Berdasarkan data DISPENDA dari tahun 2007 sampai dengan 2014, realisasi PAD setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja menunjukkan pengelolaan PAD cukup baik. Apabila dilihat dari elemen PAD, pendapatan yang bersumber dari Pajak daerah juga meningkat setiap tahunnya. Selama periode tersebut kontribusi Pajak daerah terhadap PAD cukup signifikan yaitu rata-rata di atas 50%. Namun bila dilihat dari keseluruhan Pendapatan kontribusi Pajak daerah masih sangat kecil, sebagai berikut dapat dilihat pada tabel:

Tabel Kontribusi Pajak Daerah

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Seluruh Pendapatan	Kontribusi Pajak Daerah Thd PAD (%)	Kontribusi Pajak Daerah Thd Seluruh Pendapatan (%)
2007	32.907.282.295	62.555.977.748	200.772.805.108	53	16,39
2008	37.150.861.882	64.995.580.604	256.650.495.511	57	14,48
2009	39.254.332.892	68.264.428.586	771.964.089.993	58	5,08
2010	42.962.620.588	80.510.646.971	826.295.439.728	53	5,20
2011	73.061.359.184	118.554.981.543	933.376.048.907	62	7,83
2012	89.610.952.329	138.086.121.907	1.196.002.882.456	65	7,49
2013	111.508.975.587	167.313.762.016	1.285.106.361.570	66	8,68
2014	134.413.962.588	216.427.691.789	1.452.589.208.703	62	9,25

Berikut realisasi Pajak daerah yang konsisten ada selama periode penelitian dapat dilihat pada Grafik 4.1 berikut :

Grafik 4.1
Realisasi Pajak Daerah Terhadap PAD



Sumber : Pemerintah Kota Banjarmasin

Berdasarkan grafik tersebut PPJU merupakan penghasil pajak daerah terbesar dan pajak parkir sebagai penghasil pajak daerah terkecil. Hal tersebut mencerminkan Banjarmasin masih belum cukup mengembangkan potensi PAD nya, karena PPJU memang menjadi kebutuhan utama setiap masyarakat.

4.2 Proses Analisis Data

Tujuan penggunaan regresi linear berganda pada penelitian ini untuk melihat pengaruh variabel independen (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan Pajak Parkir) baik secara simultan maupun parsial terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) dengan menggunakan uji F dan uji t serta untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen melalui koefisien determinasi.

4.2.1. Uji F (Uji Koefisien Regresi bersama-sama)

Tabel 4.5
Analisis Output ANOVA

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.219E22	6	3.698E21	1708.998	.019 ^a
	Residual	2.164E18	1	2.164E18		
	Total	2.219E22	7			

a. Predictors: (Constant), PAJAK PARKIR, PAJAK REKLAME, PAJAK HOTEL, PPJU, PAJAK HIBURAN, PAJAK RESTORAN

b. Dependent Variable: PAD

- a. Merumuskan Hipotesis
Untuk mengetahui apakah semua variable independen berpengaruh secara simultan terhadap PAD, sehingga hipotesis sebagai berikut :
Ho : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PPJU dan Pajak Parkir secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap PAD.
Ha : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PPJU dan Pajak Parkir secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD.
- b. Menentukan F hitung dan Signifikansi
Dari output diperoleh F hitung sebesar 1708 dan signifikansi sebesar 0.019
- c. Menentukan F tabel
F tabel sebesar 230
- d. Kriteria Pengujian
 - 1) Jika $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel}$, maka Ho diterima
 - 2) Jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, maka Ha diterima
- e. Kesimpulan
F hitung $>$ F tabel dimana $1708 > 230$ dengan signifikansi < 0.05 ($0.019 < 0.05$), maka Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PPJU dan Pajak Parkir secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD.

4.2.2. Uji t

Hasil Uji t dari 6 Variabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Coefisien Variabel

Variabel Independen	Nilai t-hitung	Sig
Pajak Hotel (X_1)	2.319	0.259
Pajak Restoran (X_2)	5.595	0.113
Pajak Hiburan (X_3)	-2.323	0.259
Pajak Reklame (X_4)	1.289	0.420
Pajak Penerangan Jalan Umum/ PPJU (X_5)	4.490	0.140
Pajak Parkir (X_6)	-3.402	0.182

Variabel pajak hotel berpengaruh terhadap PAD, hal ini berdasarkan t hitung lebih besar daripada t tabel. Dimana t hitung $2.319 \geq -2.015$, dengan signifikansi 25.9%.

Variabel pajak restoran memiliki nilai t hitung sebesar 5.595 yang lebih besar dibandingkan t tabel, sehingga dapat disimpulkan pajak restoran berpengaruh terhadap PAD dengan signifikan 11.3%.

Variabel pajak hiburan berdasarkan t hitung memiliki nilai negatif, yaitu -2.323 . hal ini menyebabkan t hitung lebih kecil dibanding t tabel. Nilai negatif tersebut menyebabkan variabel pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD dengan tingkat signifikan 25.9%.

Variabel Pajak reklame berpengaruh terhadap PAD, dimana t hitung (1.289) lebih besar dibandingkan t tabel dengan tingkat sigifikansi 42 %.

Variabel Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) memiliki nilai t hitung 4.490 lebih besar dibanding t tabel dengan tingkat significant 14%, sehingga dapat disimpulkan PPJU berpengaruh terhadap PAD.

Variabel Pajak Parkir berdasarkan t hitung memiliki nilai negatif yaitu sebesar -3.402 , dimana nilai tersebut lebih kecil dibanding t tabel, sehingga dapat disimpulkan Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap PAD, dengan nilai significant 18,2%

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.3.1. Variabel Pajak Hotel

Variabel Pajak Hotel (X_1) mempunyai hubungan positif dengan Pendapatan Asli Daerah dengan besarnya koefisien korelasi adalah 2.319 dengan tingkat signifikansi 0.259. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya, bila dilihat dari signifikan yang kecil yaitu Siti Rochimah (2012).

4.3.2. Variabel Pajak Restoran

Variabel Pajak Restoran (X_2) mempunyai hubungan positif dengan Pendapatan Asli Daerah dengan besarnya koefisien korelasi adalah

5.595 dengan tingkat signifikansi 0.113 . Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya, bila dilihat dari signifikansi yang kecil yaitu Siti Rochimah (2012).

4.3.3. Variabel Pajak Hiburan

Variabel Pajak Hiburan (X3) mempunyai hubungan negatif dengan Pendapatan Asli Daerah dengan besarnya koefisien korelasi adalah -2.323 dengan tingkat signifikansi 0.259 . Hasil penelitian sebelumnya belum ada menggunakan variabel pajak hiburan.

4.3.4. Variabel Pajak Reklame

Variabel Pajak Reklame (X4) mempunyai hubungan positif dengan Pendapatan Asli Daerah dengan besarnya koefisien korelasi adalah 1.289 dengan tingkat signifikansi 0.420 . Hasil penelitian sebelumnya hanya secara kualitatif dengan rumus kontribusi. (Rahayuning, 2009).

4.3.5. Variabel PPJU

Variabel PPJU (X5) mempunyai hubungan positif dengan Pendapatan Asli Daerah dengan besarnya koefisien korelasi adalah 4.490 dengan tingkat signifikansi 0.140 . Hasil penelitian terdahulu belum ada yang menggunakan PPJU sebagai variabel penelitian.

4.3.6. Variabel Pajak Parkir

Variabel Pajak Parkir (X6) mempunyai hubungan negatif dengan Pendapatan Asli Daerah dengan besarnya koefisien korelasi adalah -3.402 dengan tingkat signifikansi 0.182 . Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya Nariana, (2007-2011) dimana kontribusi pajak parkir berpengaruh terhadap PAD kota Palembang.

5. SIMPULAN

1. Bahwasanya secara parsial pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan ppju berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin, hal ini berdasarkan t hitung lebih besar daripada t table. Sedangkan pajak hiburan dan pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
2. Secara simultan, pendapatan asli daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, ppju dan pajak parkir.
3. Menghadapi MEA, pemerintah daerah terutama Dispenda harus jeli melihat peluang investasi dari Negara ASEAN sebagai PMA yang dapat meningkatkan pajak daerahnya. Secara intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai potensi yang dimiliki daerah agar masyarakat dan investor tertarik untuk berinvestasi sehingga secara langsung dapat meningkatkan pajak daerah.
4. Mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang dapat mendorong peningkatan jenis pajak daerah tersebut agar intensifikasi pajak dapat terpenuhi.
5. Pemerintah daerah hendaknya tidak hanya memfokuskan satu jenis pajak saja untuk digali sumbernya, tetapi juga lebih memperhatikan jenis pajak yang lain agar lebih mandiri yang sesuai peraturan yang berlaku / ekstensifikasi pajak
6. Meningkatkan jumlah Wajib pajak yang menerapkan system Pajak Online pada Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

7. Menambah personil Silent Operation dengan menggunakan jasa pihak ke 3 agar lebih objektif dan independent
8. Penelitian yang direkomendasikan adalah dengan menggunakan semua jenis pajak daerah sebagai variabelnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, Isroy dan Nurul Huda, Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Otonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang.
- Asnawi, Said Kelana dan Chandra Wijaya. 2005. *Riset Keuangan (Pengujian Empiris)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik Banjarmasin. 2014.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Indeks.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. 2014. *Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan*. Banjarmasin: Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Gomies, Stevanus J dan Victor Pattiasina. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara.
- Hidayat, Taufik. 2011. *Panduan Lengkap Menguasai SPSS 19 Untuk Mengolah Data Statistik Penelitian*. Jakarta: PT Trans Media.
- Kadir. 2015. *Statistika Terapan (Konsep, Contoh dan Analisis Data Dengan Program SPSS/ Lisrell dalam Penelitian)*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Kusuma, Md Krisna Arta Anggar dan Ni Gst Putu Wirawati, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Se Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. S.3 (2013)
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Nariana, Siti Khairani dan Ratna Juwita. Analisis Kontibusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.
- Nugroho, Adi. Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 – 2012
- Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2011 tentang pajak hotel.
- Perda Kota Banjarmasin No.11 tahun 2011 tentang pajak restoran.
- Perda Kota Banjarmasin No. 10 tahun 2011 tentang pajak hiburan.
- Perda Kota Banjarmasin No. 24 tahun 2010 tentang pajak reklame.
- Perda Kota Banjarmasin No. 21 tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan.
- Perda Kota Banjarmasin No. 7 tahun 2011 tentang pajak parkir.
- Priyatno, Duwi. 2009. *5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Rochimah, Siti, Kharis Raharjo dan Abrar Oemar, Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2012. *Jurnal*.
- Santoso, Singgih. 2014. *Statistik Multivariate (Konsep dan Aplikasi dengan SPSS)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Setyawati, Martani. Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2013. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual Pendekatan Teknis Sesuai Dengan PP No. 71/ 2010*. Bandung: Alfabeta.
- Utomo, Okta Sigit. Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- Widiyanto, Mikha Agus. 2013. *Statistika Terapan (Konsep dan Aplikasi SPSS/LISREL dalam Penelitian Pendidikan Psikologi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindu.

Anonymous, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, 2001, Lembaran Negara RI No. 119 Sekretaris Negara RI. Jakarta.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, 2001, Lembaran Negara RI No. 119 Sekretaris Negara RI. Jakarta.

-----, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2000, Lembaran Negara RI No. 119 Sekretaris Negara RI. Jakarta.

<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Pajak%20Bersiap%20Hadapi%20Kawasan%20Bebas%20ASEAN.pdf>